

ANALISIS PENGARUH *AGGREGAT DEMAND* DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI ACEH

Masri Fithrian, ST¹, Prof. Dr. Nur Syechalad, MSi.², Dr. Muhammad Nasir, M. Sc.³

¹⁾Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala

Jl. Tgk. Syeh Abdul Rauf No. 7, Darussalam Banda Aceh 23111, email : masrifithrian@gmail.com

^{2,3)}Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala Jl. Tgk. Syeh Abdul Rauf No. 7, Darussalam Banda Aceh 23111

Abstract: *This study aims to analyze aggregate demand and education level on income inequality in Aceh. Using Fixed Effect Model on panel data (cross-section and time series data from 23 administrative regencies/cities in Aceh over 2010-2013 period). The findings of the study show that the effects of consumption has positive and significant effects on income inequality, and government expenditure on income inequality are negative and significant effect. However, Investment and Education level has positive and it is not significant effects on income inequality in Aceh. Government policies are needed to manage government expenditure with increase of capital expenditure for encourage the economy and with long-term policies on increasing quality of education and social protection program of marginal society both from the side of access, quantity and quality.*

Keyword : *Inequality Income, Consumption, Investment, Government Expenditure, Education Level, Panel Data, random effect.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Aggregat demand* dan tingkat pendidikan terhadap kesenjangan pendapatan di Aceh, menggunakan data panel (*cross section dan time series* data dari 23 kabupaten/kota di Aceh tahun 2010-2013). Penelitian ini menggunakan *Fixed Effect Model* dan hasilnya menunjukkan bahwa Konsumsi mempunyai pengaruh positif dan signifikan, Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan. Sebaliknya Investasi dan Tingkat Pendidikan ,berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di Aceh. Diperlukan Kebijakan pemerintah dalam mengelola pengeluaran pemerintah yang mendorong perekonomian dengan peningkatan belanja modal, serta Kebijakan pemerintah jangka panjang dalam peningkatan mutu pendidikan dan program perlindungan sosial masyarakat marginal dari sisi akses, kuantitas dan kualitas.

Kata Kunci : Kesenjangan pendapatan, konsumsi, Investasi, pengeluaran pemerintah, tingkat pendidikan, data panel, *random effect*.

PENDAHULUAN

Permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan *Gross Domestic Product* (GDP), pengurangan ketimpangan pendapatan dan penghapusan kemiskinan. Di beberapa negara, tujuan tersebut kadang-kadang menjadi sebuah dilema antara mementingkan pertumbuhan ekonomi atau mengurangi ketimpangan pendapatan

(Deininger dan Olinto:2000). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu memberi jaminan bahwa ketimpangan pendapatan akan rendah. Banyak negara sedang berkembang yang mempunyai pertumbuhan ekonomi ($\pm > 7$ %/tahun), tetapi tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinannya juga tinggi. Hal ini menimbulkan tuntutan untuk lebih

mementingkan pengurangan ketimpangan pendapatan daripada pertumbuhan ekonomi.

Ketimpangan pendapatan yang diprosikan dengan ketidakmerataan distribusi pendapatan antar rumah tangga dengan tingkat pendapatan per kapita telah menjadi parameter kemiskinan yang umum disepakati selain status gizi masyarakat.

Dalam persektif *economic growth*, tingginya angka pengangguran (relatif dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi) dianggap sebagai sumber masalah perekonomian yang akan berujung pada masalah kemiskinan. Dengan asumsi tersebut, maka bila angka pertumbuhan ekonomi dapat dipacu melebihi tingginya angka pengangguran (*unemployment rate*), maka jumlah orang tanpa pekerjaan berkurang dengan kata lain semakin banyak orang yang akan mendapatkan kepastian pendapatan. Hal di atas tidak jauh berbeda dengan pandangan tradisional tentang ketimpangan berpendapat bahwa ketimpangan merupakan *necessary condition* dan insentif yang baik bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Argumen dasarnya bahwa pendapatan yang tinggi pengusaha dan perseorangan akan menaikkan tabungan, tabungan yang tinggi akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi (Sumitro Djojohadikusumo: 1994). Setelah itu baru mekanisme *trickle down effect* berjalan, dengan melalui program perpajakan dan subsidi.

Ketimpangan pendapatan masyarakat sendiri dapat dikur dengan mengevaluasi Rasio

Gini yang memiliki kisaran 0-1. Jika bernilai nol artinya pemerataan sempurna dan sebaliknya jika bernilai satu berarti ketimpangan sempurna. Rasio Gini kecil lebih kecil dari 0,4 menunjukkan ketimpangan rendah, nilai 0,4-0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan nilai lebih besar dari 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi.

Rasio Gini Provinsi Aceh pada Tahun 2007-2008 sebesar 0,27 dan tahun 2009 sebesar 0,29 masih tergolong dalam kelompok ketimpangan rendah. Indeks Gini yang rendah ini tidak bermakna positif karena rendahnya indeks gini tersebut dipengaruhi oleh dominasi kelompok masyarakat miskin. Hal ini tergambar dari pendapatan per kapita penduduk Aceh (non migas) pada tahun 2011 berdasarkan harga konstan hanya sebesar Rp. 6.718.952 / tahun (Rp. 559.913/bulan) atau berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 15.943.742/tahun (Rp. 1.328.645/bulan). Sementara itu, distribusi pendapatan penduduk Aceh untuk tahun 2007 pada kelas 40 persen terendah sebesar 22,63 persen, kelas 40 persen menengah sebesar 39,38 persen dan kelas 20 persen tertinggi sebesar 37,99 persen. Sedangkan pada tahun 2008 distribusi pendapatan pada kelas 40 persen terendah sebesar 22,64 persen, kelas 40 persen menengah sebesar 38,68 persen dan kelas 20 persen tertinggi sebesar 38,68 persen. Persentase distribusi pendapatan penduduk kelas 40 persen terendah sebesar 22,64 persen yang di dominasi oleh penduduk miskin perlu diturunkan oleh pemerintah Aceh.

Berdasarkan teori John Maynard Keynes dapat kita lihat bagaimana ubungan sektor sektor *agregat demand* dalam pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan.

a. Konsumsi

Hubungan konsumsi dengan pendapatan digambarkan oleh fungsi konsumsi Keynes, yang sering ditulis sebagai berikut :

$$C = C_0 + cY_d, \quad C_0 > 0, 0 < c < 1$$

b. Investasi

Investasi swasta atau Penanaman modal dalam negeri (PMDN) bruto merupakan komponen dari perbelanjaan agregat yang sifatnya tidak stabil, dan menjadi salah satu sumber penting dari konjungtur dalam perekonomian

c. Pengeluaran Pemerintah

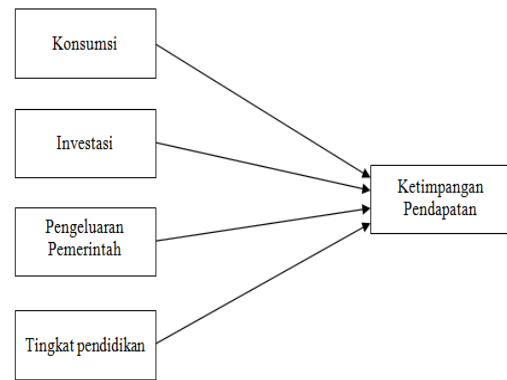
Faktor yang menentukan pengeluaran pemerintah adalah 1) pajak yang diharapkan akan diterima, 2) pertimbangan-pertimbangan politik; dan 3) persoalan-persoalan ekonomi yang sedang dihadapi (Sadono, 2000).

d. Pendidikan

Dalam konteks ini, pendidikan merupakan elemen penting pembangunan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan kebutuhan jaman dalam mengakses faktor-faktor produksi yang ada dan mampu menopang hidup untuk lebih layak dengan meningkatnya pendapatan yang diperoleh

Berdasarkan teori dan hasil hasil penelitian sebelumnya yaitu Wodon (1999),

Waluyo (2004), Onaran dan Galanis (2013) dan Carvalho dan Rezai (2014), dapat diperkirakan hubungan ketimpangan pendapatan Aceh berdasarkan *agregat demand* dari variabel Konsumsi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah di tambah dengan tingkat Pendidikan. Hubungan variabel-variabel tersebut dengan ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan dalam kerangka pemikiran penelitian seperti Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini mencakup variabel ketimpangan pendapatan sebagai variabel terikat berdasarkan nilai indeks gini kabupaten/kota dalam provinsi Aceh.

Variabel bebas yang digunakan adalah *agregat demand* dalam ekonomi tertutup yang ditinjau dari sektor-sektor konsumsi, investasi dan pengeluaran pemerintah. Variabel konsumsi masyarakat Aceh diperoleh dari rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dari masing masing kabupaten/kota. Variabel investasi merupakan jumlah dari investasi penanaman modal dalam negeri dan

penanaman modal asing di tiap kabupaten/kota Provinsi Aceh. Variabel pengeluaran pemerintah dihitung dari realisasi pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Aceh baik belanja langsung maupun tidak langsung.

Variabel Tingkat pendidikan sendiri merupakan persentase jumlah penduduk Aceh yang menyelesaikan pendidikan minimal SD dari Kabupaten/kota.

Dalam penelitian ini, teknis analisis data yang digunakan untuk melihat hubungan *aggregat demand* terhadap ketimpangan pendapatan di Aceh menggunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (*model causal*) yang diolah dengan menggunakan program Eviews 7.

Model persamaan struktural merujuk kepada Model ekonometrika dasar yang dikembangkan oleh Wodon (1999) yang mengestimasi hubungan pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan yaitu :

$$G_{kt} = \alpha + \beta Y_{kt} + \alpha_k + \epsilon_{kt} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana :

G_{kt} : Indeks Gini pada daerah k periode t

Y_{kt} : Pertumbuhan ekonomi pada daerah k periode t

α_k : Area fixed/random effect

ϵ_{kt} : Faktor kesalahan (*error term*)

Model regresi tersebut bukan menunjukkan kausalitas namun mengukur korelasi pada data panel.

Dengan memasukkan *aggregat*

demand sebagai pertumbuhan ekonomi dari sektor pengeluaran pada ekonomi tertutup berdasarkan teory Keynes dimana :

$$Y = K + I + PP \dots \dots \dots (2)$$

Y : Pertumbuhan ekonomi

K_i : Konsumsi penduduk

I : Investasi Swasta

PP : Pengeluaran Pemerintah

Maka dengan menambahkan variabel tingkat pendidikan sehingga diperoleh model baru yaitu :

$$Gini_{it} = \alpha_i + \beta_1 K_{it} + \beta_2 \text{Log } I_{it} + \beta_3 \text{Log } PP_{it} + \beta_4 TP_{it} + \epsilon_{it} \dots \dots \dots (3)$$

Dimana :

G_{it} : Indeks Gini Aceh (nilainya antara 0 dan 1)

K_{it} : Konsumsi penduduk Aceh (dalam satuan Rupiah)

I_{it} : Investasi Swasta (dalam satuan Rupiah)

PP_{it} : Pengeluaran Pemerintah (dalam satuan Rupiah)

TP_{it} : Tingkat Pendidikan yang ditamatkan (persentase)

α : *Intercept (fixed/random effect)*

ϵ_{it} : Faktor kesalahan (*error term*) subskrip i melambangkan kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh

i : Kabupaten 1,2,3,...23

subskrip t melambangkan waktu

t : 2010-2013

Model yang digunakan adalah model *double log* atau model elastisitas konstan merupakan salah satu hasil transformasi dari

suatu model tidak linear menjadi model linear dengan cara membuat model dalam bentuk Logaritma. Sehingga parameter β yang di dapat melambangkan elastisitas ketimpangan pendapatan terhadap Investasi dan Pengeluaran Pemerintah. Model regresi tersebut bukan menunjukkan kausalitas namun mengukur korelasi pada data panel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pusat Statistik Nasional mencatat Ketimpangan pendapatan Aceh pada tahun 2010 adalah 0,30 dan naik menjadi 0,34 pada tahun 2013, dengan rata-rata pertumbuhan periode 2010-2013 sebesar 4,51 persen. Rincian perkembangan ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Aceh periode 2010-2013 dapat dilihat pada Tabel 1 :

Tabel 1. Ketimpangan pendapatan kabupaten/kota provinsi Aceh periode 2010-2013

No	Kabupaten/Kota	TAHUN				Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2010	2011	2012	2013	
1	Simeulue	0,295	0,290	0,288	0,313	2,10
2	Aceh Singkil	0,253	0,284	0,336	0,306	7,21
3	Aceh Selatan	0,249	0,292	0,309	0,309	7,70
4	Aceh Tenggara	0,292	0,293	0,279	0,306	1,75
5	Aceh Timur	0,282	0,279	0,309	0,306	2,91
6	Aceh Tengah	0,296	0,267	0,247	0,241	-6,57
7	Aceh Barat	0,326	0,231	0,249	0,246	-7,52
8	Aceh Besar	0,322	0,300	0,287	0,245	-8,60
9	Pidie	0,244	0,282	0,247	0,240	0,11
10	Bireun	0,333	0,246	0,279	0,309	-0,65
11	Aceh Utara	0,302	0,279	0,280	0,309	1,03
12	Aceh Barat Daya	0,295	0,293	0,279	0,309	1,77
13	Gayo Lues	0,250	0,254	0,273	0,310	7,54
14	Aceh Tamiang	0,269	0,262	0,252	0,304	4,74
15	Nagan Raya	0,254	0,270	0,279	0,309	6,80
16	Aceh Jaya	0,257	0,220	0,283	0,222	-2,44
17	Bener Meriah	0,260	0,267	0,298	0,221	-3,85
18	Pidie Jaya	0,243	0,277	0,278	0,249	1,31
19	Banda Aceh	0,592	0,567	0,561	0,500	-5,38
20	Sabang	0,366	0,304	0,399	0,418	6,36
21	Langsa	0,284	0,345	0,335	0,321	4,80
22	Lhokseumawe	0,273	0,249	0,452	0,267	10,60
23	Subussalam	0,286	0,279	0,278	0,309	2,78
	Aceh	0,30	0,33	0,32	0,341	4,51

Sumber : data diolah dari berbagai sumber.

Perkembangan konsumsi masyarakat Aceh periode 2010-2013 cenderung meningkat, hal tersebut terlihat dari rata-rata pertumbuhan pengeluaran perkapita perbulan di kabupaten/kota bernilai positif.

Rincian pengeluaran perkapita perbulan kabupaten/kota di Aceh periode 2010-2013 dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini.

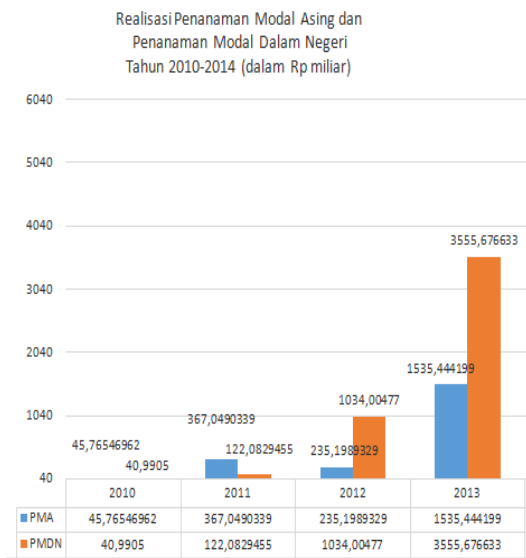
Tabel 2. Pengeluaran perkapita perbulan kabupaten/kota di Aceh periode 2010-2013

No	Kabupaten/Kota	TAHUN				Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2010	2011	2012	2013	
1	Simeulue	547.712	462.287	498.817	470.470	-4,46
2	Aceh Singkil	536.263	464.325	522.875	520.597	-0,41
3	Aceh Selatan	513.942	460.829	491.470	497.701	-0,81
4	Aceh Tenggara	380.544	410.668	417.681	489.579	8,95
5	Aceh Timur	527.639	435.998	518.979	493.713	-1,07
6	Aceh Tengah	604.433	615.201	671.553	727.758	6,44
7	Aceh Barat	634.545	540.947	638.683	643.018	1,33
8	Aceh Besar	631.351	634.179	713.186	657.318	1,69
9	Pidie	488.385	519.939	614.220	628.705	8,98
10	Bireun	429.271	453.047	440.932	497.280	5,21
11	Aceh Utara	394.995	430.954	448.833	448.774	4,41
12	Aceh Barat Daya	380.799	428.448	434.765	507.569	10,24
13	Gayo Lues	416.337	560.065	537.842	547.136	10,76
14	Aceh Tamiang	509.037	521.547	497.478	555.296	3,15
15	Nagan Raya	505.690	504.030	467.662	530.181	1,94
16	Aceh Jaya	539.682	629.513	709.194	677.644	8,28
17	Bener Meriah	430.376	589.982	620.863	695.775	18,13
18	Pidie Jaya	531.539	558.734	608.251	636.093	6,19
19	Banda Aceh	1.138.205	1.321.108	1.297.418	1.443.707	34,81
20	Sabang	599.766	735.641	871.248	1.001.611	13,04
21	Langsa	735.641	789.507	775.375	845.997	16,21
22	Lhokseumawe	587.710	630.877	977.803	762.181	12,22
23	Subussalam	429.755	435.254	430.984	488.159	4,52

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (diolah)

Rincian Realisasi Investasi di Aceh baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing dapat di lihat pada Grafik 1 dibawah ini :

Grafik 1. Realisasi Investasi PMDN dan PMA Tahun 2010-2013



Sumber : Badan Investasi dan Promosi Aceh (diolah)

Realisasi Pengeluaran Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh mengalami pertumbuhan signifikan. Hal tersebut dapat dilihat pada rincian realisasi pengeluaran pemerintah kabupaten/kota tahun 2010-2013 pada Tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3. Realisasi Pengeluaran Pemerintah kabupaten/kota tahun 2010-2013.

No	Kabupaten/Kota	TAHUN				Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2010	2011	2012	2013	
1	Simeulue	308.796.201	414.846.142	448.213.569	509.873.458	18,71
2	Aceh Singkil	322.886.469	418.846.439	422.191.214	496.946.009	16,07
3	Aceh Selatan	488.252.343	545.544.615	651.401.096	752.788.886	15,57
4	Aceh Tenggara	498.441.273	633.434.723	590.639.466	641.262.311	9,63
5	Aceh Timur	663.317.529	749.624.083	802.212.909	993.575.507	14,63
6	Aceh Tengah	479.108.270	616.212.322	677.773.193	817.881.940	19,76
7	Aceh Barat	549.017.171	520.099.807	594.812.144	750.654.629	11,77
8	Aceh Besar	646.274.213	713.243.333	824.630.864	997.980.125	15,67
9	Pidie	606.093.742	745.363.109	851.184.009	1.094.381.800	21,92
10	Bireun	617.963.984	744.844.160	851.320.228	1.068.774.807	20,12
11	Aceh Utara	944.443.421	1.194.433.066	1.265.839.550	1.535.304.908	17,91
12	Aceh Barat Daya	349.559.687	429.072.721	547.450.756	581.407.106	18,85
13	Gayo Lues	392.026.933	482.626.572	459.056.624	523.964.415	10,79
14	Aceh Tamiang	455.911.923	545.833.620	605.900.685	669.865.698	13,76
15	Nagan Raya	465.396.864	534.756.825	556.949.493	665.100.098	12,82
16	Aceh Jaya	421.120.832	460.113.278	475.806.006	554.501.339	9,74
17	Bener Meriah	390.646.131	437.817.923	450.433.630	527.887.269	10,72
18	Pidie Jaya	408.475.663	460.261.326	433.330.731	518.472.478	8,82
19	Banda Aceh	590.968.373	735.839.400	808.960.677	968.796.520	18,07
20	Sabang	390.002.367	449.794.360	466.441.127	492.235.666	8,19
21	Langsa	390.320.572	461.171.976	473.658.650	572.638.611	13,92
22	Lhokseumawe	412.837.293	532.139.891	659.498.572	593.167.680	14,26
23	Subussalam	279.416.229	334.797.000	358.737.323	320.193.453	5,41

Sumber : BPS ; Statistik Keuangan Pemerintah kabupaten/kota(diolah)

Rincian persentase penduduk kabupaten/kota yang menyelesaikan pendidikan minimal Sekolah Dasar periode 2010-2013 dapat dilihat pada Tabel 4 :

Tabel 4. Persentase penduduk yang menyelesaikan pendidikan minimal SD menurut Kab/kota tahun 2010-201

No	Kabupaten/Kota	PERSENTASE PENDUDUK YANG MENYELESAIKAN PENDIDIKAN			
		2010	2011	2012	2013
1	Simeulue	80,68	80,67	82,09	82,49
2	Aceh Singkil	64,32	68,42	65,59	71,18
3	Aceh Selatan	72,38	77,03	74,19	77,78
4	Aceh Tenggara	79,65	82,00	79,83	82,02
5	Aceh Timur	73,08	74,68	75,12	77,13
6	Aceh Tengah	81,56	81,11	82,31	86,01
7	Aceh Barat	79,41	77,14	80,02	78,37
8	Aceh Besar	81,08	84,38	83,85	83,34
9	Pidie	78,73	79,45	80,05	76,80
10	Bireun	82,52	82,38	83,05	81,48
11	Aceh Utara	73,00	77,73	80,22	79,03
12	Aceh Barat Daya	71,59	77,13	78,49	78,59
13	Gayo Lues	56,26	71,45	69,94	72,56
14	Aceh Tamiang	73,42	77,01	74,26	77,16
15	Nagan Raya	71,88	77,19	79,67	78,90
16	Aceh Jaya	77,99	80,01	80,34	81,91
17	Bener Meriah	80,55	80,86	81,01	83,84
18	Pidie Jaya	77,66	79,61	76,84	75,86
19	Banda Aceh	91,19	90,59	93,30	92,06
20	Sabang	84,89	88,92	89,08	88,34
21	Langsa	83,54	84,78	87,76	85,32
22	Lhokseumawe	86,53	85,44	85,90	88,49
23	Subussalam	58,57	61,08	60,66	68,18

Sumber : BPS Aceh ; Aceh dalam Angka 2011-2014 (diolah).

HASIL ESTIMASI

Pengujian data panel dapat dilakukan dengan tiga model yaitu model pendekatan kuadrat terkecil (*pooled least square*), pendekatan efek tetap (*fixed effect*) dan pendekatan efek acak (*random effect*). Pengujian fungsi tingkat ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Aceh menggunakan data panel untuk 23 kabupaten/kota dari tahun 2010 sampai dengan 2013 dengan variabel terikat ketimpangan pendapatan (Gini) dan variabel bebas Konsumsi (Kons), Investasi (Inv), Pengeluaran Pemerintah (PP) dan Tingkat Pendidikan (TP).

Setelah uji hasil ketiga model pendekatan dengan *F Test (Chow Test)* dan Hausman Test ternyata model yang tepat adalah *Fixed effect*.

Tabel 6. Hasil Estimasi dengan Model Fixed Effect

Variabel Bebas	Notasi	Koefisien	t-Statistik	Prob.
Konstanta	C	0.139739	1.100773	0.2781
Konsumsi	Kons	1.29E-07	1.524406	0.1359*
Investasi	Inv	2.03E-14	1.142822	0.2603
Pengeluaran Pemerintah	PP	-1.05E-10	-2.194948	0.0345**
Tingkat Pendidikan	TP	0.001921	1.108816	0.2743
Jumlah Observasi (unbalanced panel)	63			
R-Squared	0.914931			
Adjusted R-squared	0.857452			
F-Statistik	15.91761			
Prob. (F-Statistik)	0.000000			
Durbin-Watson Stat	2.720728			

Keterangan :

Variabel terikat : Ketimpangan Pendapatan (Gini)

* = signifikan pada $\alpha = 0,01$

** = signifikan pada $\alpha = 0,05$

Sumber : Output Eviews 7.0

Hasil estimasi dengan model *fixed effect* diperoleh koefisien determinasi atau *Adjusted R-squared* 0.857452 yang berarti 85,74 persen ketimpangan pendapatan Aceh mampu dijelaskan oleh variabel *Aggregat Demand* (konsumsi, investasi, Pengeluaran

Pemerintah) dan Tingkat Pendidikan, sedangkan sisanya 14,26 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang belum dimasukkan dalam persamaan.

Nilai *F-statistic* diperoleh sebesar 15,91761 atau lebih besar dari *F-table*_(4,58) yaitu 2,53. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini secara keseluruhan adalah signifikan dengan $p\text{-value} < 0,05$. Dengan demikian, model tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh sektor *Aggregat demand* (konsumsi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah) dan tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Pengaruh masing-masing variabel tidak terikat terhadap variabel terikat dapat dilihat dengan membandingkan nilai *t-statistic* terhadap *t-tabel* atau melihat *p-value*. Dari hasil estimasi diperoleh koefisien variabel Konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan $p\text{-value} < 0,10$ (10 persen). Variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan $p\text{-value} < 0,05$ (5 persen). Sedangkan Variabel Investasi dan Tingkat Pendidikan Berpengaruh Positif dan tidak signifikan, dimana 1% kenaikan tingkat pendidikan masyarakat Aceh dalam menyelesaikan pendidikan akan meningkatkan Ketimpangan pendapatan sebesar 0.001921% dengan asumsi variabel lain tetap.

Faktor faktor penyebab yang dapat digambarkan dari sektor *Aggregat Demand*

yang berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan adalah :

1. sektor konsumsi, Pertumbuhan Peningkatan PDRB perkapita Aceh dibarengi dengan peningkatan konsumsi masyarakat Aceh. Hal ini sesuai dengan teori peningkatan *disposable income* akan meningkatkan konsumsi dengan asumsi pajak tidak berubah karena penambahan pajak akan mengurangi konsumsi dan akan menurunkan pendapatan.

2. Investasi, pada tahun 2010-2014 realisasi investasi di Aceh terus mengalami peningkatan yang signifikan tiap tahunnya. Pada tahun 2014 meningkat sebesar 22,31 menjadi 6.226,85 triliun.. Namun hal ini tidak sejalan dengan daya serap tenaga kerja Indonesia . Hal ini disebabkan Investasi dalam bentuk PMDN dan PMA membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan yang tinggi, sedangkan ketersediaan tenaga terampil atau kompeten yang tersedia di Aceh masih sangat rendah dibuktikan dengan tingkat pengangguran terbuka kelompok umur 25-34 tahun 2013 mencapai 20,16 persen. (Aceh Dalam Angka 2014, BPS Aceh).

Variabel *Aggregat demand* yang berpengaruh Negatif dan signifikan adalah Pengeluaran Pemerintah dimana dengan porsi Pendapatan dari Dana Otonomi Khusus dan dana Penyesuaian pemerintah daerah, Provinsi Aceh mencapai 31,24 % dari total pendapatan daerah. Sehingga Besarnya Belanja Pemerintah baik belanja publik maupun belanja modal berpengaruh besar terhadap pendapatan masyarakat Aceh dan secara signifikan

mengurangi ketimpangan pendapatan.

Variabel Tingkat Pendidikan sendiri ternyata berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan Aceh hal ini sesuai dengan kualitas mutu pendidikan Aceh masih rendah walaupun Alokasi anggaran yang disediakan pemerintah provinsi Aceh untuk meningkatkan mutu pendidikan sangat besar dan setiap tahunnya terus meningkat bahkan saat ini mencapai 2 triliun, dengan sumber dana berasal dari otsus dan bagi hasil migas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Konsumsi masyarakat Aceh berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan pendapatan Aceh.
2. Investasi swasta berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Ketimpangan pendapatan Aceh.
3. Pengeluaran Pemerintah Aceh berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan Aceh..
4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Aceh berpengaruh Positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan Pendapatan Aceh.

Saran

Berdasarkan pembahasan hasil analisis yang diperoleh dari penelitian ini, maka saran-saran yang dapat diajukan antara lain :

1. Pemerintah diharapkan untuk mengantisipasi ketimpangan Pendapatan masyarakat Aceh dengan kebijakan yang mendorong masyarakat menabung dan tidak terjebak dengan pola konsumtif baik berupa program perlindungan sosial yang lebih menyentuh masyarakat marginal dari sisi akses, kuantitas dan kualitas sehingga menurunkan biaya pengeluaran non makanan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, perlindungan anak, juga jaminan sosial bagi keluarga miskin.
2. Pemerintah diharapkan mendorong pemerataan peningkatan mutu pendidikan sehingga penduduk Aceh mempunyai daya saing dalam dunia kerja dan punya keterampilan dan keahlian dalam mengakses peluang peningkatan pendapatan secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alesina, A., Rodrik, D. (1994). *Distributive Politic And Economic Growth*, The Quarterly Journal of Economics 109.
- Baltagi, B.H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data 3rd edition*. WestSussex: John Wiley and Sons.
- Bourguignon, F. (2004). *The Poverty-Growth-Inequality Triangle*. Washington: World Bank.
- Chen S, Ravallion, M. (1997). *What can new survey data tell us about recent changes in distribution and poverty?*, World Bank Economic Review.
- Darmansyah. (2015). strategi peningkatan mutu pendidikan di Aceh. Diunduh

- dari <http://diluputnews.com/read/27674/strategi-peningkatan-mutu-pendidikan-aceh.html>.
- Deinenger K, Olinto P (1999), *Asset Distribution, Inequality, and Growth, Policy Research Working Paper*, Washington, World Bank.
- Deinenger, K., Squire, L. (1996). *A New Data Set Measuring Income Inequality*, World Bank Economic Review, Vol 1, pp 565-91.
- Dollar, D., Kraay, A. (2002., *Growth is good for the poor*. Journal Of Economic Growth 7:195-225 Galor O, Zeira J (1993), *Income Distribution and macroeconomics*, Reviews of Economic Studies (1993) 60, 35-52.
- Hidayat, S., Patunru A.A. (2007). Pertumbuhan Ekonomi, ketidakmerataan pendapatan dan kemiskinan: estimasi parameter elastisitas kemiskinan tingkat provinsi di Indonesia tahun 1996-2005, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hajiji, A. (2010). Keterkaitan antara pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Riau 2002-2008, *Tesis*, Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Katalog BPS : 3205012. (2007). Analisis tipologi Kemiskinan Perkotaan (Studi Kasus di Jakarta Utara), Badan Pusat Statistik.
- Katalog BPS : 9302002.11. (2014). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh menurut Pengeluaran Provinsi Aceh 2010-2013, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.
- Kakwani, N., Prakash, B., Son H.H. (2000). *Growth, inequality and poverty: an introduction*, *Asian Development Reviews*.
- Lincoln, A. (1999). Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Yogyakarta, BPFE-UGM.
- Mahrizal. (2014). Analisis Kesenjangan Pendapatan Antar Kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh, *Tesis*, Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.
- Mirza, Denni Sulistio, (2012), Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009, *Economic Development Analysis. Journal, Edaj* 1(1) 2012.
- Shintia, C.L. (2010). Analisis *Pro-Poor Growth* di Indonesia Melalui Identifikasi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan, *Tesis*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tim Penyusun Agenda Riset IPB. (2009). *Agenda Riset Strategis bidang Penanggulangan Kemiskinan 2010-2015*.
- Waluyo, J. (2004). Hubungan Antara Tingkat Kesenjangan Pendapatan dengan Pertumbuhan Ekonomi Suatu Studi Lintas Negara, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 9 No.1 Juni 2004.
- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika Teori dan aplikasi untuk Ekonomi dan bisnis*, Edisi Kedua, cetakan kesatu, Ekonisia, Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta.
- Wodon, Q.T. (1999). *Growth, Poverty, and inequality : a regional panel for Bangladesh, Policy Research Working Paper*, Washington: World Bank.